



Pejah Gesang Nderek Sultan

Warga Tegal Lempuyangan Tolak Penggusuran

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja*
- Warga di Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta, memasang spanduk menolak penggusuran dari PT Kereta Api Indonesia. Perusahaan milik negara itu

akan mengembangkan Stasiun Lempuyangan dengan memperluas sisi selatan.

Penolakan tersebut, salah satunya, dengan memasang *banner* di depan kampung. Tulisannya yakni Warga Menolak Penggusuran oleh PT KAI yang dilengkapi lambang Hobo Keraton Yogyakarta. Ada pula yang berbunyi Pejah Gesang Nderek Sultan.

■ Baca **PEJAH...** Hal II



REMBUGAN: Banner yang dipasang di sekitar kampung Tegal Lempuyangan, Bausasran, Kota Yogyakarta, kemarin (9/4).

Scanned

Pejah Gesang Nderek Sultan

sambungan dari hal Joglo Jogja

Berdasarkan informasi dari warga terdampak penggusuran, nantinya Jalan Lempuyangan yang berada di sisi selatan stasiun akan dijadikan jalan khusus bagi penumpang. Kemudian, bangunan rumah dinas di sisi selatan akan digunakan untuk perkantoran. Jalan umum akan dibuatkan baru di sisi selatan rumah dinas PT KAI. Saat ini, rumah dinas PT KAI ini telah ditempati warga. Total ada 13 kepala keluarga (KK) yang menempati 13 bangunan. Rinciannya, sebelas bangunan di sisi selatan Jalan Lempuyangan menghadap ke utara dan dua bangunan ke Jalan Hayam Wuruk.

Ketua RW 01 Bausasran Anton Handriutomo mengungkapkan, rencana perluasan

Stasiun Lempuyangan atau modernisasi itu disampaikan PT KAI saat sosialisasi 26 Maret silam di kantor Kelurahan Bausasran. "Itu setelah kami meminta sosialisasi dilakukan di tempat netral," kata Anton, Rabu (9/4/2025).

Ia mengungkapkan, sebelumnya PT KAI secara mendadak memberikan undangan untuk sosialisasi pada tanggal 14 Maret. Tapi, memberikan undangan pada 13 Maret siang. "Yang kedua, kita merasa terintimidasi, karena ngantar undangan kita kok harus empat orang tiga staf, satu Polsuska. Yang ketiga, kita keberatan kalau diadakan di PT KAI, kita minta diadakan di pihak netral, bisa di Kelurahan atau di Kecamatan," katanya.

Perwakilan warga A. Foki

Ardiyanto menambahkan, 13 bangunan rumah dinas itu berdiri di atas tanah Sultan Ground. Saat ini, tempat itu telah berubah menjadi tempat usaha bagi puluhan masyarakat. "Puluhan masyarakat selama ini mengais rejeki disana sebagai tukang parkir dan PKL menyatakan sikap menolak rencana modernisasi tersebut," katanya.

Mereka selama ini, lanjut Foki, telah mengantongi surat keterangan tanah (SKT) dari BPN sebagai bukti penguasaan fisik atas bangunan yang mereka tempati di atas tanah Sultan Ground. Mereka juga sudah puluhan tahun tinggal.

Itu sebagai bukti dari negara bahwa mereka selama ini merawat bangunan fisik tersebut. Mulai rehab saat terjadi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006

sampai ketika rusak karena puting beliung. Mereka pun membayar listrik serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Atas masalah itu, mereka sudah mengadu ke Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat *open house*, Rabu (9/4) pagi. Atas aduan itu, Hasto mengaku akan mempelajari terlebih dahulu.

"Saya jawab bahwa saya akan mempelajari alas haknya dan saya akan *matur* (sampaikan) dulu ke Keraton (Yogyakarta). Nanti ada surat dan ada utusan dari kota untuk kita memohon apa arahan dari keraton terkait dengan alas hak tanah ini," ujarnya. Di lain pihak, PT KAI saat dihubungi belum memberikan respons. Humas PT KAI Daerah Operasi (Daops) VI belum membalas pesan singkat yang dilayangkan. (*eri/amd/wa*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005